

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan

Abstrak

Persetujuan Dan Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel Dan Tabel Ilustrasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Krangka Pemikiran	8
G. Langkah – Langkah Penelitian	19

BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM , PENEGAKAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Negara Hukum	
1. Istilah dan Pengertian Negara Hukum	23
2. Negara Hukum Indonesia	27
B. Penegakan Hukum	
1. Istilah Dan Pengertian Penegakan Hukum	29
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
3. Aparat Hukum Dan Lembaga Penegak Hukum	35
C. Sistem Peradilan Pidana	
1. Istilah Dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana	77
2. Bentuk Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana	79

3. Kewenangan Lembaga-Lembaga Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana83
4. Etika Profesi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana 85

BAB III. KAJIAN UMUM TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM PRAPERADILAN

- A. Sejarah Praperadilan93
- B. Istilah Dan Pengertian Praperadilan96
- C. Kewenangan Hakim Dalam Praperadilan97
- D. Urgensi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum98
- E. Kelemahan Praperadilan Dalam KUHAP94
- F. Kelemahan Praperadilan101

BAB IV. ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TERHADAP KASUS KORUPSI

- A. Hakim menafsirkan di luar Pasal 77 KUHAP103
- B. Kendala Hakim Dalam Menerapkan Pasal 77 KUHAP124
- C. Akibat Hukum dari Kekeliruan Putusan Praperadilan..... 125
- D. Putusan Hakim Haswandi Serupa Dengan Putusan Sebelumnya127

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan134
2. Saran135

DAFTAR PUSTAKA136

LAMPIRAN-LAMPIRAN142

RIWAYAT HIDUP143